

PEDOMAN TEKNIS



PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

Pedoman Teknis

Perluasan Areal Hortikultura TA. 2014



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

KATA PENGANTAR

Pedoman teknis perluasan areal hortikultura dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Pertanian khususnya yang menangani perluasan areal hortikultura, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapang dalam melaksanakan kegiatan perluasan areal hortikultura yang bersumber dari dana APBN maupun dana lainnya.

Para petugas teknis diharapkan mempelajari dan mencermati pedoman teknis ini dengan seksama sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan agar dapat tercapai kinerja yang optimal.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara Nasional sehingga Dinas Pertanian lingkup Provinsi perlu menerbitkan **Petunjuk Pelaksanaan** dan Dinas Pertanian lingkup Kabupaten/Kota perlu menerbitkan **Petunjuk Teknis** yang menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Diharapkan petugas Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta tingkat lapangan memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman teknis ini, sehingga mempermudah gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu dalam berbagai kesempatan

yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dan sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif.

Akhirnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam frame waktu yang telah ditentukan dan kegiatan ini benar-benar bermanfaat sebesar-besarnya khususnya bagi petani.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Perluasan dan Pengelolaan

Lahan,



Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.
NIP. 19580526 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	3
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	4
2.1. Pengertian	4
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan	6
2.3. Komponen Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura	6
III. SPESIFIKASI TEKNIS	7
3.1. Norma	7
3.2. Standar Teknis	7
3.3. Kriteria	8
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	11
4.1. Cara Pelaksanaan	11
4.2. Tahapan Pelaksanaan	11

V. PEMBIAYAAN	18
5.1. Sumber Pembiayaan	18
5.2. Pengelolaan Dana	19
VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	20
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi	20
6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	20
6.3. Format Laporan	21
6.4. Alur Laporan	22
6.5. Bobot Laporan	23
VII. PENGENDALIAN.....	24
VIII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL	
HORTIKULTURA	28
8.1. Indikator Masukan (Input)	28
8.2. Indikator Keluaran (Output)	28
8.3. Indikator Hasil (Outcome)	29
8.4. Indikator Manfaat (Benefit)	29
8.5. Indikator Dampak (Impact)	29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Tahun 2014.....	30
Lampiran 2. Contoh Kuesioner Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Perluasan Areal Hortikultura	31
Lampiran 3. Contoh Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Perluasan Areal Hortikultura.....	33
Lampiran 4. Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura.....	34
Lampiran 5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Ditjen PSP TA. 2014	35
Lampiran 6. Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura TA. 2014	36
Lampiran 7. Matrik Realisasi Fisik Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura TA. 2014	37
Lampiran 8. Contoh Outline Laporan Akhir Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura TA. 2014.....	38
Lampiran 9. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura TA. 2014.....	39

Lampiran 10a.	Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura Tingkat Pusat.....	40
Lampiran 10b.	Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura Tingkat Provinsi.....	41
Lampiran 10c.	Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura Tingkat Kabupaten.....	42
Lampiran 11.	Alokasi Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura TA. 2014	43

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program pengembangan agribisnis hortikultura khususnya buah-buahan merupakan bagian integral dari program pembangunan pertanian nasional.

Permintaan terhadap buah-buahan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri hulu dan hilir yang mendukung potensi serapan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Fenomena dalam kehidupan masyarakat juga menunjukkan meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan, mendorong peningkatan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan.

Ditinjau dari ketersediaan dan daya dukung sumber daya alam, maka Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Berbagai daerah dengan karakteristik dan kondisi agropedoklimatnya dapat dikembangkan untuk berbagai jenis buah-buahan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan terhadap produk hortikultura, diperlukan usaha peningkatan produksi yang mengarah kepada peningkatan efisiensi usaha, produktivitas, dan mutu produk.

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan penguasaan dan aplikasi ilmu dan teknologi, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan optimal dalam skala usaha yang layak, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam manajemen usaha, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam melaksanakan agribisnis hortikultura.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan komoditas hortikultura (buah-buahan) adalah penumbuhan sentra-sentra produksi komoditas melalui perluasan areal hortikultura (buah-buahan). Kegiatan perluasan areal hortikultura (buah-buahan) dimaksudkan untuk membantu petani dalam pengadaan saprotan agar dapat memanfaatkan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan/terlantar menjadi lahan produktif untuk komoditas buah-buahan yang pada akhirnya menjadi tambahan pendapatan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Perluasan areal hortikultura merupakan upaya investasi jangka panjang dan diarahkan untuk komoditas buah-buahan Unggulan Nasional yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura di daerah, maka diperlukan adanya pedoman teknis perluasan areal hortikultura untuk memberikan

acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Pertanian, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapangan.

1.2. Tujuan

Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura bertujuan :

- a. Menambah baku lahan dan produksi hortikultura.
- b. Menambah luas areal kawasan sentra produksi hortikultura.
- c. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan/terlantar untuk pengembangan komoditas hortikultura.

1.3. Sasaran

Jenis komoditas yang dikembangkan diprioritaskan komoditas buah-buahan Unggulan Nasional (mangga, manggis, durian, jeruk, rambutan) dan Unggulan Daerah yang mempunyai pangsa pasar yang baik.

Sasaran kegiatan perluasan areal hortikultura TA. 2014 adalah terwujudnya penambahan luas areal hortikultura pada kawasan sentra pengembangan hortikultura seluas 2.500 Ha, yang tersebar di 19 provinsi mencakup 49 kabupaten/kota.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Pengertian

- a. **Perluasan Areal Hortikultura** adalah usaha penambahan baku lahan hortikultura yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hortikultura.
- b. **Bantuan Sosial**; transfer uang, barang, atau jasa kepada masyarakat atau kelompok masyarakat guna melindungi terjadinya resiko sosial dan sifat bantuan tidak begulir.
- c. **Identifikasi CPCL** adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan perluasan areal hortikultura yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
- d. **Rancangan Sederhana Perluasan Areal Hortikultura** adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta rancangan teknis secara sederhana pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan yang berisi antara lain ; tata letak kepemilikan petani, tata letak pertanaman dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- e. **Lahan Rawa** adalah lahan yang tergenang air secara alami baik secara terus menerus maupun musiman sebagai akibat dari drainase yang buruk sehingga mempunyai ciri-ciri khusus baik fisik, kimiawi maupun biologi.

- f. **Lahan Rawa Pasang Surut Tipe C** adalah lahan rawa pasang surut yang tidak pernah terluapi air, walaupun pasang besar akan tetapi ketinggian muka air tanah masih dekat dengan permukaan tanah < 50 cm.
- g. **Lahan Rawa Pasang Surut Tipe D** adalah lahan rawa pasang surut yang tidak terluapi air pasang dan tinggi muka air tanah > 50 cm dari permukaan tanah.
- h. **Lahan yang sementara tidak diusahakan** adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara tidak diusahakan minimal 1 (satu) tahun.
- i. **Tegalan/Tanah Darat** adalah sebidang tanah yang diusahakan/dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering.
- j. **Vegetasi Hutan Ringan** adalah jenis vegetasi yang tumbuh pada lahan di luar kawasan hutan berupa semak dan alang-alang.
- k. **Komoditas Buah-buahan Unggulan** adalah komoditas buah-buahan yang mempunyai pangsa pasar, keuntungan kompetitif, nilai ekonomi yang tinggi serta sebaran sentra produksi yang sesuai dengan agropedoklimat. Komoditas buah-buahan unggulan terdiri dari Unggulan Daerah dan Unggulan Nasional.
- l. **Agropedoklimat** adalah kesesuaian teknis komoditi tertentu terhadap sifat fisik, kimia tanah dan iklim setempat, termasuk temperatur, jumlah hari hujan dan faktor lingkungan lainnya.

- m. **Kawasan Sentra Produksi Hortikultura** adalah suatu kawasan sebagai pusat pengembangan agribisnis komoditas hortikultura yang berkelanjutan dengan luasan berskala ekonomis. Kawasan ini dapat berlokasi pada satu atau lebih kabupaten yang berdekatan/ berdampingan.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
- b. Penetapan Petani dan Lokasi
- c. Sosialisasi Kegiatan
- d. Pembuatan Rancangan Sederhana
- e. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
- f. Pelaksanaan Fisik
- g. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (pengadaan bibit, pupuk dan pestisida)
- h. Penanaman dan Pemeliharaan

2.3. Komponen Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura

No	Kegiatan	Sumber Pembiayaan
1.	Pembukaan, pengolahan lahan, dan penanaman	Dana TP/swadaya
2.	Sarana Produksi (Bibit, pupuk, dan pestisida)	Dana TP/swadaya

III. SPESIFIKASI TEKNIS

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura hendaknya mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

3.1. Norma

Perluasan areal hortikultura merupakan usaha penambahan baku lahan hortikultura yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hortikultura unggulan (buah-buahan).

3.2. Standar Teknis

Standar teknis perluasan areal hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Komoditas yang dikembangkan adalah buah-buahan Unggulan Nasional terutama mangga, manggis, durian, jeruk dan rambutan dan Unggulan Daerah yang mempunyai pangsa pasar yang baik.
- b. Bibit tanaman hortikultura harus bersertifikat.
- c. Tinggi bibit tanaman hortikultura minimal 50 cm.
- d. Kemiringan/topografi maksimal 30% dilakukan sesuai kaidah konservasi seperti membuat teras, rorak, dan lain-lain.
- e. Untuk lahan rawa pasang surut, lokasi yang disarankan pada tipe C atau D.

- f. Pembukaan lahan hortikultura diarahkan pada Kawasan Sentra Produksi (KSP) yang sudah ada dan berpotensi untuk dikembangkan.
- g. Luas dalam satu hamparan diupayakan minimal 5 ha, dengan 1 (satu) jenis komoditas hortikultura (buah-buahan Unggulan Nasional atau Unggulan Daerah).

3.3. Kriteria

Kriteria lokasi dan petani yang mendapatkan bantuan kegiatan perluasan areal hortikultura adalah sebagai berikut :

a. Lokasi

- Lokasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Lokasi merupakan daerah pengembangan kawasan sentra produksi buah-buahan Unggulan Nasional atau Daerah.
- Lokasi tidak berada pada Kawasan Hutan.
- Lokasi telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas lingkup pertanian melalui SK Penetapan Lokasi.
- Lokasi bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.
- Lokasi mempunyai aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau.

- Lokasi mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program yang sejenis dari kegiatan lain.
- Diutamakan lokasi yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan hutan ringan).
- Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas hortikultura (buah-buahan).
- Faktor iklim (curah hujan, angin, kelembaban dan suhu)
- Berada dalam wilayah binaan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

b. Petani

- Belum pernah menerima kegiatan yang sama/ sejenis pada tahun sebelumnya.
- Bersedia melaksanakan kegiatan yang dinyatakan dengan **"surat pernyataan kesanggupan"** sebagai peserta seperti pada lampiran 9.
- Pemilik penggarap dan atau penggarap, ada bukti tertulis sebagai penggarap dan membuat perjanjian pinjam pakai dengan pemilik lahan minimal selama 10 tahun.
- Kepemilikan lahan usaha tani per KK maksimal 2 Ha.

- Terlibat dalam wadah kelompok tani atau bersedia membentuk kelompok tani baru. Diutamakan kelompok tani yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.
- Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal hortikultura.
- Bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk materi dan tenaga mulai dari konstruksi, penanaman hingga pemeliharaan.
- Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan sesuai anjuran petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
- Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan perluasan areal kawasan hortikultura pada prinsipnya akan mengembangkan suatu ***Kawasan Hortikultura yang Berwawasan Agribisnis*** yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan, sehingga terwujud sentra-sentra hortikultura yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

4.1. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan perluasan areal hortikultura dilakukan dengan melibatkan ***partisipasi*** anggota kelompok tani penerima manfaat. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan perluasan areal direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani dengan bimbingan petugas lapangan.

4.2. Tahapan Pelaksanaan

a. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Pedoman teknis kegiatan perluasan areal hortikultura dijabarkan lebih lanjut dalam **Petunjuk Pelaksanaan** yang dibuat oleh Dinas

Pertanian Provinsi dan **Petunjuk Teknis** yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian yang menangani perluasan areal hortikultura Kabupaten/Kota.

b. Menyusun Jadwal Kegiatan

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada di lapangan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam “**Jadwal Palang**” seperti contoh pada lampiran 1.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait antara lain instansi lingkup pertanian, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Penetapan Petani dan Lokasi

Sebelum penetapan lokasi dan petani terlebih dahulu dilakukan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) oleh Tim Teknis Dinas lingkup pertanian kabupaten. Hasil identifikasi CPCL yang memenuhi syarat dan kriteria ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

e. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi bertujuan agar kelompok tani penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan.

f. Rancangan Sederhana

Rancangan sederhana dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok tani secara swadaya. Rancangan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rancangan Sederhana memuat antara lain :

- Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan peta desa dan letak lokasi.
- Titik koordinat dan luas areal kegiatan, diukur dengan alat *Global Positioning System* (GPS).
- Batas hampan dan batas kepemilikan lahan masing-masing petani, letak lubang tanam, dan garis kontur. Tata letak lubang tanam mengikuti kontur (sesuai kaidah konservasi).
- Daftar definitif petani dan luas kepemilikan lahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan rincian dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rancangan sederhana yang dibuat.

g. Penyusunan RUKK

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun berdasarkan kesepakatan di dalam kelompok tani dengan bimbingan petugas lapangan dan tim teknis. RUKK sekurang-kurangnya berisi rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, kebutuhan dan sumber pembiayaan. RUKK harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Contoh RUKK sebagaimana pada lampiran 4.

h. Pelaksanaan Fisik

1) Konstruksi

Kegiatan konstruksi perluasan areal hortikultura dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan anggota kelompok tani penerima manfaat sebagai tenaga kerja. Dimungkinkan kelompok tani menyewa alat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi.

Komponen kegiatan konstruksi adalah sebagai berikut :

- **Land clearing** (pembukaan/pembersihan lahan), besaran biaya land clearing disesuaikan dengan jenis/tipe vegetasi yang ada pada calon lokasi. Pembersihan lahan dilakukan dengan cara mengumpulkan pohon dan semak belukar **“tanpa pembakaran” (zero burning)**.



- **Pembuatan bangunan konservasi** dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi dan mempertahankan kesuburan lahan. Jenis bangunan konservasi yang dibangun dapat berupa teras bangku, teras individu/kredit, guludan, Saluran Pembuangan Air (SPA). *Pembuatan teras dilakukan pada lahan miring yang sejajar dengan garis kontur dan memotong lereng.* Pada lahan rawa dibuat surjan/tabukan.

- **Pembuatan lubang tanam**, disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan dikembangkan.



- **Pemupukan dasar dan penanaman**

Kegiatan pemberian pupuk dasar dilaksanakan setelah lubang tanam selesai dibuat dan dibiarkan selama 1 minggu, kemudian dilanjutkan kegiatan penanaman.



2) Pengadaan Sarana Produksi Pertanian

- **Pengadaan Bibit**

Pemilihan bibit buah-buahan disesuaikan dengan agropedoklimat. Bibit harus mempunyai sertifikat dari instansi yang berwenang, dengan tinggi bibit minimal 50 cm.

- **Pengadaan Pupuk dan Pestisida**

Pengadaan pupuk (organik/anorganik), pestisida (insektisida dan herbisida) disesuaikan dengan kebutuhan.

3) Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman terdiri dari kegiatan penyulaman, penyiangan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani penerima manfaat.

V. PEMBIAYAAN

5.1. Sumber Pembiayaan

a. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) TA.2014 sebesar Rp 7.000.000,-/ha, berada pada akun **Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang**. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik seperti konstruksi (pembukaan lahan, pengolahan lahan dan penanaman) dan pengadaan saprotan (bibit, pupuk dan pestisida).

b. Dana Sharing APBD Kabupaten/Kota dan Petani Penerima Manfaat

Dana sharing dari APBD dan swadaya petani penerima manfaat dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti identifikasi CPCL, rancangan sederhana dan pemeliharaan.

5.2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Sosial dengan tata cara yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 129/Permentan/OT.140/12/2013 tentang ***Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian 2014.***

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan perluasan areal hortikultura dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

Kegiatan ditingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
- b. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
- c. Menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan perluasan areal hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan tugas :

- a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh provinsi yang disesuaikan dengan lokalita setempat.
- c. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan perluasan areal hortikultura.
- d. Melakukan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura dan disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat secara berkala.

6.3. Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Bulanan

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan dan mengirim ke dinas provinsi. Laporan tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Provinsi dan dikirim ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan). Format laporan bulanan untuk kabupaten dan provinsi sebagaimana lampiran 5.

- b. Laporan Akhir

Pada akhir tahun anggaran Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi wajib membuat laporan akhir

kegiatan dan dikirim ke pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan)

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif dengan dilengkapi foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir kegiatan sebagaimana lampiran 8.

6.4. Alur Laporan

Alur laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
- b. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Provinsi dan dikirim ke pusat.
- c. Laporan bulanan dikirim ke pusat melalui pos dengan alamat :
 - **Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan**
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550
 - melalui faximile dengan nomor : **021 – 7805552**
 - melalui e-mail dengan alamat :
subdit.horbunnak@gmail.com

d. Waktu pengiriman

- Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
- Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

6.5. Bobot Laporan

Setiap aktivitas kegiatan perluasan areal hortikultura dimulai dari persiapan administrasi, penyiapan lahan, pengadaan saprotan dan penanaman diberikan bobot (%) sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bobot (%)
1.	Persiapan (SK-SK dan pembukaan rekening kelompok)	20 35
2.	Konstruksi (pembukaan dan pengolahan lahan).	30
3.	Pengadaan saprotan	15
4.	Penanaman	
	TOTAL	100

VII. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan seluruh proses kegiatan berupa audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Adapun susunan organisasi tim Satuan Pelaksana (Satlak) sebagai berikut :

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat (Direktorat)

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Perluasan dan Pengelolaan
Lahan

Ketua : Kasubdit

Sekretaris : Kasi

Anggota : 1. wakil dari masing-masing
pelaksana kegiatan
2.
3.dst

b. Tingkat Dinas Provinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap tri wulan yaitu :

Triwulan I : Akhir bulan Maret 2014

Triwulan II : Akhir bulan Juni 2014

Triwulan III : Akhir bulan September 2014

Triwulan IV : Akhir bulan Desember 2014

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Direktorat), provinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

b. Tingkat Provinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Provinsi dan Kabupaten

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

5. Pelaporan

Laporan pengendalian berupa hasil checklist dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat).

Dinas Pertanian Provinsi melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat).

Format laporan menggunakan ceklist pengendalian seperti pada lampiran 8a, 8b,8c dan dikirim sesuai jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2014

Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2014

Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2014

Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2014

VIII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura, diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, dengan indikator sebagai berikut :

8.1 Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura, yang dalam hal ini antara lain :

- Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN)
- Perangkat Peraturan Pemerintah, bahan kebijakan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- Data potensi lahan yang dapat dikembangkan
- Sumber Daya Manusia (SDM)

8.2 Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk yang dihasilkan (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Keluaran yang diharapkan kegiatan ini adalah bertambahnya luas areal hortikultura 2.500 ha.

8.3 Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari keluaran kegiatan pada jangka menengah yaitu meningkatnya produksi komoditas hortikultura.

8.4 Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh masyarakat dari kegiatan, yaitu terbentuknya kawasan sentra produksi hortikultura, tersedianya produk hortikultura yang berkualitas.

8.5 Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan lain dari capaian kinerja setiap indikator kegiatan, yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.

LAMPIRAN

JADWAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA TA. 2014.

[illegible]

CONTOH KUESIONER IDENTIFIKASI CALON PETANI DAN CALON LOKASI PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA

I. Calon Lokasi Pengembangan

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa :

Jarak lokasi ke desa km, ke kota Kecamatan km, ke kota Kabupaten/kota km dan ke provinsi km.

Ketinggian tempat diatas permukaan laut (dpl) m.

II. Keadaan Umum Lokasi

- Tipe/jenis lahan calon lokasi
 - Lahan kering
 - Lahan rawa lebak
 - Lahan rawa pasang surut
- Jenis vegetasi lahan calon lokasi
 - Tegalan
 - Semak belukar
 - Hutan ringan
 - Hutan berat
 - Lain –lain

- Tingkat kemiringan lahan
 - Datar
 - Bergelombang
 - Berbukit
 - Bergunung
- Sumber pengairan
 - Irigasi
 - Tadah hujan
 - Sungai
 - Air tanah
 - Lain-lain sebutkan

III. Jenis Komoditas Hortikultura (buah-buahan) yang dikembangkan

- Jeruk :..... ha
- Mangga :..... ha
- Manggis :.....ha
- Durian :.....ha

VI. Jumlah Kelompok Tani dalam Desa

No	Kelompok Tani	Jumlah Kelompok	Luas Lahan
...		...	...

Lampiran 3.

CONTOH DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA

Propinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Kelompok :
 Luas Areal :

Jenis Lahan : 1. Lahan Kering (LK) 2. Lahan Rawa (LR)

Nomor Urut Petani	Nama Petani	LUAS KEPEMILIKAN (Ha)															JUMLAH
		SEMAK/ALANG-ALANG					HUTAN RINGAN					HUTAN BERAT					
		Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 7 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 8 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 9 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Mengetahui,
 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.....

Pelaksana,
 Survei Investigasi dan Desain
 Perluasan Areal Hortikultura

Lampiran 4.

CONTOH RUKK KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Kelompok Tani :
Komoditi/Luasan (Ha) :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
	Konstruksi dan saprodi					
1	Pembabatan semak		HOK			APBN /Bansos
2	Pembersihan lahan		HOK			APBN /Bansos
3	Pengumpulan batang tebaran		HOK			APBN /Bansos
4	Pembuatan bangunan konservasi		HOK			APBN /Bansos
5	Pembuatan lubang tanam		HOK			APBN /Bansos
6	Pengolahan tanah		HOK			APBN /Bansos
7	Pengadaan bibit		btg			APBN /Bansos
8	Pengadaan saproten - Urea - TSP - KCl/ZA - Organik - Herbisida		Kg Kg Kg Kg kg			APBN /Bansos
9	Papan nama					Kelompok
						Kelompok

Ketua
 Kelompok Tani

(.....)

Mengetahui,

Tim Teknis Kabupaten

Kepala Dinas

(.....)

(.....)

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN											Form PSP. 01
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN											
T.A. 2014											
Dinas	:										
Kabupaten	:										
Provinsi	:										
Subsektor	:										
Program	:										
Bulan	:										
No. SP DIPA	:										

No.	Aspek/Kegiatan	Target		Realisasi				Lokasi Kegiatan			Keterangan
		Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran (Rp)	(%)	Fisik (Ha/Km/Unit)	(%)	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat	
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan										
	1. Cetak Sawah										
	2. JUT										
	3. Japrod										
	4. Optimasi Lahan										
	5. dst										
2	Pengelolaan Air Irigasi										
	1. JITUT										
	2. JIDES										
	3. Tata Air Mikro (TAM)										
	4. dst										
3	Alat dan Mesin Pertanian										
	1. Tractor Roda 2										
	2. Tractor Roda 4										
	3. dst										
4	Pupuk dan Pestisida										
	1. Penguatan KP3										
	2. Skrening Pestisida										
	3. dst										
5	Pembiayaan										
	1. PUAP										
	2. dst										
	JUMLAH										

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com

....., 2014
Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA TA. 2014

No.	Provinsi Kabupaten	Komoditas	Target		No SK Penetapan Lokasi	Lokasi			Koordinat		Volume (ha)	Transfer Dana			Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Keterangan
			Fisik (ha)	Keuangan (Rp)		Kecamatan	Desa	Poktan	East (Bujur Timur)	North or South (LU/LS)		No SP2D	Tgl SP2D	Dana (Rp)	Volume (ha)	(%)	Keuangan (Rp)	(%)	
TOTAL																			

Matrik Realisasi Fisik Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura										
TAHUN 2014										
NO	PROVINSI	Komoditas	Target Fisik (Ha)	Realisasi Fisik						Keterangan
				CPCL (Ha)	Transfer Dana (Rp)	Pembersihan Lahan (Ha)	Pengolahan Tanah (Ha)	Pengadaan Saprodi (Ha)	Penanaman (Ha)	

**CONTOH OUTLINE
LAPORAN TEKNIS AKHIR KEGIATAN
PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA TA. 2014**

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran Lokasi
- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
 - 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditas
 - 2.2. Komponen Kegiatan
- III. LOKASI KEGIATAN
- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - 4.1. Tahapan Kegiatan
 - 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
 - 5.1. Permasalahan yang Dihadapi
 - 5.2. Pemecahan Masalah
- VI. ANALISIS KINERJA
 - Input, Output, Outcome
- VII. MANFAAT KEGIATAN
- VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA
TA. 2014**

Dengan ini kami,

Kelompok Tani :

Alamat :

Jumlah anggota :

Luas Alokasi Kegiatan :

Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal hortikultura sesuai dengan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan areal hortikultura dengan sebaik-baiknya.

....., 2014

Kelompok Tani,

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSP
2. Kepala Dinas Pertanian Prov.
3. Kepala Dinas Pertanian Kab.

CHEK LIST
PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA
TINGKAT PUSAT :

DINAS PROPINSI :
 TARGET : HA, (Rp.....)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	Rancangan sederhana	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Kadis	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 %	 HA	
13	Ditanami	 HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan	 HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

CHEK LIST
PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA
TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN :
 TARGET : HA, (Rp.....)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	Rancangan sederhana	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Kadis	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 %	 HA	
13	Ditanami	 HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan	 HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA
TINGKAT KABUPATEN :

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	Rancangan sederhana	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Kadis	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 %	 HA	
13	Ditanami	 HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan	 HA	

ALOKASI KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA TA. 2014

NO	PROVINSI	KABUPATEN	Volume	Mendukung Komoditi
2	JAWA BARAT	GARUT	40 Ha	JERUK
			20 Ha	MANGGIS
			20 Ha	DURIAN
		SUMEDANG	100 Ha	MANGGA
		KOTA TASIKMALAYA	30 Ha	MANGGIS
		SUKABUMI	30 Ha	MANGGIS
3	JAWA TENGAH	SEMARANG	20 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		PURBALINGGA	30 Ha	JERUK
		TEGAL	30 Ha	MANGGA
4	DI YOGYAKARTA	GUNUNG KIDUL	20 Ha	DURIAN
			20 Ha	MANGGA
5	JAWA TIMUR	GRESIK	100 Ha	MANGGA
		LUMAJANG	30 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		MAGETAN	40 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		NGAWI	40 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
6	ACEH	ACEH BESAR	50 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		ACEH TAMIANG	100 Ha	MANGGA
7	SUMATRA UTARA	LABUHAN BATU	10 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		NIAS BARAT	20 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
10	JAMBI	BATANGHARI	30 Ha	JERUK
		MUARO JAMBI	30 Ha	JERUK
		TANJUNG JABUNG BARAT	50 Ha	JERUK
		KOTA SUNGAI PENUH	20 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
12	LAMPUNG	TANGGAMUS	20 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		PESAWARAN	20 Ha	PISANG
13	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	60 Ha	PISANG
		SANGGAU	20 Ha	DURIAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN	Volume	Mendukung Komoditi
14	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	20 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
18	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	20 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		KOTA PALU	20 Ha	MANGGA
19	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	20 Ha	DURIAN
		WAJO	30 Ha	DURIAN
		KOTA PALOPO	30 Ha	DURIAN
		LUWU TIMUR	30 Ha	DURIAN
20	SULAWESI TENGGARA	BUTON	100 Ha	JERUK
		BUTON UTARA	50 Ha	MANGGA
		KONawe	150 Ha	DURIAN
		KONawe SELATAN	150 Ha	JERUK
		KONawe UTARA	100 Ha	DURIAN
			100 Ha	JERUK
		KOLAKA TIMUR	100 Ha	JERUK
		MUNA	150 Ha	DURIAN
		BOMBANA	100 Ha	DURIAN
24	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN	40 Ha	JERUK
27	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	20 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		HALMAHERA SELATAN	20 Ha	DUKU
		HALMAHERA TIMUR	20 Ha	JERUK
		KEPULAUAN SULA	20 Ha	MANGGA
29	BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	20 Ha	DURIAN
31	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	20 Ha	DURIAN
32	PAPUA BARAT	SORONG	20 Ha	KOMODITAS HORTI LAINNYA
		KOTA SORONG	50 Ha	MANGGA
33	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	100 Ha	DURIAN
			2.500	